

DAFTAR SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DI KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

NO	REGISTER	PEMOHON INFORMASI	TERMOHON (BADAN PUBLIK)	INFORMASI YANG DIMINTA	KETERANGAN
1.	001/IV/KI Kalteng-PS/2025	Edward Saragih, SH.,MH & Associates	Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab. Kotim	1.Memohon kejelasan Sertifikat Tanah Milik Nomor 3279 atas nama Nio Hermanto yang tumpang tindih dengan 19 Sertifikat Hak Milik (daftar terlampir) 2.Memohon kejelasan Sertifikat Tanah Milik Nomor 3285 atas nama Nio Hermanto yang tumpang tindih dengan 4 Sertifikat Hak Milik (daftar terlampir)	Selesai (Putusan Ajudikasi)



Ketua,

Dr. Ngismatul Choiriyah, M.PdI

DAFTAR SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DI KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

NO	REGISTER	PEMOHON INFORMASI	TERMOHON (BADAN PUBLIK)	INFORMASI YANG DIMINTA	KETERANGAN
1.	001/I/KI Kalteng- <u>PS/2024</u>	Dedi Susanto	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur	1) AMDAL PT. Mulia Agro Permai 2) AMDAL PT. Sapta Karya Damai	Selesai (Putusan Ajudikasi)
2.	002/IV/KI Kalteng- PS/2024	Pemantau Keuangan Negara	PPID Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat	1. Pelaksanaan bimtek pada komisioner mulai tahun 2018 sampai dengan 2022 a. Dimana lokasi dilaksanakan. b. Kapan dilaksanakan. c. Siapa penyelenggaranya. d. Apa hasil bimtek yang didapatkan. e. Bukti Laporan Pertanggung jawabannya keuangan dan foto sertifikat nya 2. Penggunaan Dana pengadaan Barang dan jasa melalui Penyedia jasa dan Swakelola Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 Adapun informasi yang dimohonkan adalah : a. Kerangka acuan kerja {KAK} b. Rencana Rencana Umum Pengadaan {RUP} c. Rencana anggaran4.Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; d. Spesifikasi Teknis; e. Daftar Kuantitas dan Harga; f. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; g. Gambar Rencana Pekerjaan; h. Ringkasan Kontrak yang sekurang kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat	Selesai (Putusan Sela)

				penyedia,nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak. i. Surat Perintah Mulai Kerja; j. Surat Pesanan E-purchasing (Untuk Pekerjaan Pengadaan Barang); k. Surat Perintah Membayar (SPM); l. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); m. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; n. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; o. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; p. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over. 3. LAKIP Tahun 2018 sampai dengan 2022 4. Daftar hadir Komisioner mulai Tahun 2018 sampai dengan 2022 5. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan [LPJ]mulai Tahun 2018 sampai Tahun 2022 6. Laporan Pertanggung Jawaban Perjalanan dinas antara lain seperti yang dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan dinas dalam negeri mulai Tahun 2018 sampai Tahun 2022 beserta foto copy: a. Surat Tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD; b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;	
--	--	--	--	--	--

				c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.	
3.	003/VII/KI Kalteng-PS/2023	Desi Susanto	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI	Memohon salinan ijin pelepasan kawasan hutan Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi disekitar area desa kami : 1. PT. MAJU ANEKA SAWIT 2. PT. AGRO BUKIT 3. PT. MULIA AGRO PERMAI	Selesai (Putusan Mediasi)
4.	004/VII/KI Kalteng-PS/2024	Dedi Susanto	Pengurus Koperasi Bima Penyang Mandiri (BPM)	1. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari awal produksi sampai akhir, disertai kelengkapan bukti-bukti transaksi yang sah. 2. Rekening koran koperasi dari awal sampai akhir 3. MOU koperasi dengan perusahaan PT. Agro Bukit 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) koperasi	Selesai (Putusan Mediasi)

				5. SK calon petani dan calon lahan (CPCL) yang sudah di ttd Bupati 6. Shp Luasan HGU Perusahaan dan Shp Luasan Plasma.	
--	--	--	--	---	--



Ketua,

Amah

Dr. Ngismatul Choiriyah, M.PdI